

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sektor pariwisata memiliki peran penting dalam memperkuat perekonomian, membuka peluang kerja baru, serta menjadi sarana untuk memperkaya dan mempertemukan berbagai budaya (Hakim dkk., 2025). Berdasarkan data dari *United Nations World Tourism Organization (UNWTO)*, pariwisata memberikan sumbangan sekitar 10% dari PDB global dan menyediakan 1 dari 10 lapangan kerja di dunia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 menjadi landasan utama untuk memastikan proses pembangunan, termasuk di bidang pariwisata, berlangsung secara inklusif, berkelanjutan, serta berpihak pada kelestarian lingkungan (Agustin & Ilyas, 2025). SDGs terdiri dari 17 tujuan yang mencakup berbagai aspek pembangunan antara lain, pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, hingga pelestarian ekosistem darat dan laut. Pentingnya pariwisata berkelanjutan dalam mencapai SDGs tidak dapat diabaikan. Pariwisata terkelola baik mampu melestarikan budaya lokal dan lingkungan, sekaligus mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata.



**Gambar 1. 1 Sustainable Development Goals**

Sumber: Situs *SDG Academy* Indonesia (2024)

Pariwisata merupakan elemen penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dan memiliki keterkaitan erat dengan beberapa tujuan SDGs, terutama SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan SDG 14 dan 15 (Pelestarian Ekosistem Laut dan Darat). Selain itu, pariwisata juga dapat berkontribusi pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 5 (Kesetaraan Gender), dan SDG 10 (Pengurangan Ketimpangan) (Agustin & Ilyas, 2025).

Prinsip utama SDGs, yaitu “*no one left behind*”, menekankan urgensi keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas lokal, dalam pembangunan. Sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ini, terutama melalui pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif seperti pariwisata berbasis masyarakat (Muda, 2025). Pariwisata telah lama menjadi salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam peningkatan ekonomi global. Namun, pariwisata konvensional seringkali menimbulkan dampak negatif, seperti eksploitasi sumber daya alam, ketimpangan ekonomi, dan degradasi budaya lokal (Agustin & Ilyas, 2025). Hal ini mendorong perlunya pendekatan yang

lebih berkelanjutan dan memiliki fokus pada pemberdayaan masyarakat. Konsep desa wisata kemudian muncul sebagai solusi yang menempatkan masyarakat lokal sebagai pemilik dan pengelola utama kegiatan pariwisata. Konsep ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus melestarikan lingkungan dan warisan budaya masyarakat.

Di Indonesia, sektor pariwisata merupakan pilar pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDB melalui pengembangan destinasi wisata unggulan, termasuk desa wisata (Hasibuan dkk., 2023). Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, berbagai daerah turut mengembangkan potensi pariwisatanya secara berkelanjutan. Salah satu contohnya terdapat di Kabupaten Karanganyar, yakni Desa Wisata Girimulyo yang menjadi contoh nyata pengelolaan pariwisata berkelanjutan melalui partisipasi aktif masyarakat lokal. Menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 Tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) tahun 2011 menjelaskan bahwa Desa wisata merupakan integrasi atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam struktur kehidupan masyarakat yang selaras dengan tata cara serta tradisi setempat. Desa wisata mengoptimalkan potensi lokal berupa alam, budaya, dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisatawan utama. Pengelolaan ini mampu mendorong pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal (*Local Economic Resources Development*) melalui proses berbasis komunitas dalam optimalisasi sumber daya wilayah guna meningkatkan pendapatan ekonomi lokal, pertumbuhan daerah, dan penciptaan lapangan kerja baru (Muda, 2025).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang mengatur industri pariwisata di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut, pariwisata meliputi berbagai kegiatan yang erat kaitannya dengan perjalanan yang difasilitasi oleh penyediaan fasilitas dan layanan oleh sejumlah *stakeholders*, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Sektor ini memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan penerimaan pajak dan pendapatan negara. Pertumbuhan pariwisata tidak hanya memberi manfaat bagi negara, tetapi juga masyarakat lokal, akibat keterlibatan langsung maupun tidak langsung masyarakat dalam berbagai aktivitas pariwisata. Partisipasi tersebut menunjukkan adanya hubungan yang saling menguntungkan antara pertumbuhan pariwisata dan masyarakat di mana peran masyarakat sangat penting dalam pengembangan pariwisata yang nantinya diharapkan dapat menambah pemasukan negara dari pengunjung lokal maupun pengunjung mancanegara (Hasibuan dkk., 2023)

Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia tahun 2020 hanya mencapai 4,02 juta orang, turun drastis 75,03% dibandingkan 16,11 juta kunjungan pada 2019. Penurunan ini disebabkan oleh penutupan pintu masuk internasional, pembatasan pergerakan, dan ketakutan masyarakat akan penyebaran virus. Tidak hanya wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara (wisnus) juga mengalami penurunan. Aktivitas pariwisata domestik terhambat akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larangan mudik yang diberlakukan pemerintah. Dampaknya, banyak destinasi wisata yang sepi pengunjung.



**Gambar 1. 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Jawa Tengah 2020-2024**

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah (2024)

Gambar 1.2 menunjukkan tren kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Jawa Tengah periode 2020–2024. Kunjungan wisman turun tajam dari 78.290 (2020) menjadi 1.793 (2021), kemungkinan dipengaruhi pembatasan perjalanan saat pandemi COVID-19. Setelah itu, wisman mulai pulih menjadi 144.691 (2022), meningkat signifikan menjadi 464.719 (2023), dan kembali naik menjadi 593.168 (2024). Di sisi lain, kunjungan wisatawan nusantara sempat menurun dari 22.629.085 (2020) menjadi 21.332.409 (2021). Namun, jumlahnya kemudian meningkat menjadi 46.465.437 (2022), naik lagi menjadi 56.485.087 (2023), dan mencapai 68.887.558 (2024), yang menunjukkan pemulihan serta pertumbuhan pasca pandemi

Perubahan jumlah kunjungan tersebut menunjukkan dinamika sektor pariwisata yang membutuhkan peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan dan mendorong pengembangannya. Dalam hal ini, kewenangan pemerintah daerah dalam sektor pariwisata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar dalam pengelolaan dan pengembangan potensi daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah daerah kemudian mengembangkan berbagai program seperti desa wisata, desa mandiri, kampung tematik, dan kampung nelayan sebagai bentuk penguatan sektor pariwisata. Melalui kerangka ini, pemerintah daerah juga mendorong inovasi serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan adaptif.

Pelaksanaan kewenangan tersebut tidak hanya dilakukan pada tingkat provinsi, tetapi juga diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. Setiap daerah kemudian menerjemahkan kewenangan ini ke dalam kebijakan yang lebih operasional melalui regulasi daerah sebagai pedoman pengembangan pariwisata. Salah satu bentuk implementasi tersebut dapat dilihat pada tingkat kabupaten yang mulai mengoptimalkan potensi lokal melalui pendekatan berbasis masyarakat, seperti pengembangan desa wisata.

Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu wilayah yang semakin giat mengoptimalkan potensi pariwisata lokal melalui inisiatif pembentukan desa wisata. Pengembangan pariwisata lokal di Kabupaten Karanganyar ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 oleh Pemerintah

Kabupaten Karanganyar. Perda ini mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Karanganyar Tahun 2016-2026 dan menjadi landasan strategis pengembangan pariwisata yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan selama sepuluh tahun. Perda tersebut menetapkan visi Karanganyar sebagai destinasi wisata yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, mengembangkan produk wisata berkualitas, memberdayakan masyarakat lokal, serta menekankan pelestarian lingkungan dan budaya. Pelaksanaannya mendorong kolaborasi pemerintah daerah sebagai fasilitator dan regulator bersama masyarakat dan sektor swasta sebagai pelaku aktif, sejalan dengan konsep desa wisata dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Desa Wisata Girimulyo di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, merupakan salah satu daerah yang memanfaatkan daya tarik daerahnya dengan konsep desa wisata.



**Gambar 1. 3 Desa Wisata Girimulyo Kabupaten Karanganyar**

Sumber: Situs RadarSolo. JawaPos. Com (2025)

Salah satu wisata alam yang unggul di desa ini adalah Air Terjun Parang Ijo, yang terletak di Dusun Munggur. Air terjun Parang Ijo memiliki keindahan alamnya yang

masih alami dan suasana sejuk khas daerah pegunungan sehingga menjadi daya tarik utama di Desa Wisata Girimulyo. Namun, akses menuju lokasi cukup sulit dijangkau dengan kendaraan selain motor. Sudah tersedia fasilitas dasar seperti area parkir, tempat duduk, kamar mandi, serta beberapa warung milik warga setempat. Objek wisata ini berpotensi meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat sekitar melalui pengelolaan berbasis komunitas. Melalui pengelolaan yang tepat dan pelibatan aktif warga lokal, Air Terjun Parang Ijo dapat dikembangkan sebagai wisata alam unggulan di kawasan Ngargoyoso yang mendukung pengembangan desa wisata secara berkelanjutan.



**Gambar 1. 4 Air Terjun Parang Ijo**

Sumber: Situs Pesona Karanganyar (2025)

Selain wisata alam, Desa wisata Girimulyo juga kaya akan potensi budaya. Setiap tahun pada peringatan 17 Agustus, Desa Girimulyo mengadakan festival budaya tahunan dengan tema yang unik dan berbeda-beda setiap tahunnya. Festival ini menampilkan berbagai tarian kolosal yang diambil dari cerita rakyat, di mana instrumen dan gerakan tari disusun oleh warga asli desa, mencerminkan kekayaan budaya lokal. Kombinasi wisata alam, petualangan, dan budaya yang dimiliki Desa

Girimulyo merupakan potensi strategis yang perlu dioptimalkan, baik dari aspek sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.



**Gambar 1. 5 Penampilan tari Sabuk Janur dalam Girimulyo Fest**

Sumber: Situs Tribun Jateng (2023)

Berdasarkan data dari Katalog.data.go.id menunjukkan Desa Wisata Girimulyo berlokasi di Desa Girimulyo, Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dengan alamat di Jalan Parang Ijo Munggur. Desa wisata ini dikelola oleh Kepala Desa, dengan basis wisatanya berupa wisata alam dengan daya tarik utama Air Terjun Parangijo, kolam renang, dan *flying fox*, serta masih berstatus desa wisata rintisan. SK Pokdarwis Parang Ijo Nomor 141/23 Tahun 2020 sebagai dasar kelembagaan pengelola kegiatan wisata di Desa Wisata Girimulyo, SK Kriteria dari Dinas Nomor 556/04.15/2021 yang menunjukkan pemenuhan kriteria tertentu, serta SK Penetapan Bupati Nomor 556/378 Tahun 2020 sebagai pengakuan resmi Desa Wisata Girimulyo.

**Tabel 1. 1 Data Desa Wisata Girimulyo**

DATA DESA WISATA DI JAWA TENGAH		
NAMA DESA WISATA		
1	DESA	Desa Girimulyo
2	KELURAHAN	Girimulyo

3	KECAMATAN	Ngargoyoso
4	KABUPATEN	Karanganyar
5	JALAN	Jalan Parang Ijo Munggur
6	NAMA DESA WISATA	Desa Wisata Girimulyo
<b>DATA PENGELOLA DESA WISATA</b>		
7	Nama Kades	DIAN
8	No Tlp Kades	081 226 479 31
9	Nama Pengelola	
10	No Tlp Pengelola	
<b>BASIS DESA WISATA</b>		
11	Basis Desa Wisata	Wisata Alam
12	Daya Tarik Wisata di Desa	1. Air Terjun Parangijo 2. Kolam Renang 3. Flying Fox
13	Deskripsi Desa Wisata	Desa Wisata yang memanfaatkan alam yaitu air terjun di desa Parang ijo yang bersinergi dengan masyarakat dan kearifan lokal setempat
14	Kriteria	Rintisan
<b>SURAT KETERANGAN</b>		
15	SK Pokdarwis	Pokdarwis Parang Ijo, Nomor 141 / 23 tahun 2020 tanggal 31 Desember 2019
16	SK BUMDES	
17	SK Pengelola	
18	SK Kriteria dari Dinas	Nomor 556 / 04.15 / 2021, Tanggal 17 Februari 2021
19	SK Penetapan dari Bupati	Nomor 556 / 378 Tahun 2020, Tanggal 14 Februari 2020
<b>MEDIA SOSIAL</b>		
20	<i>Youtube</i>	
21	<i>Instagram</i>	
22	<i>Tiktok</i>	
23	Lainnya	

Sumber: Situs Katalog.data.go.id (2022)

Sesuai data pada gambar di atas, Desa Wisata belum memiliki kanal promosi resmi yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan kurangnya branding dan promosi yang menjadi faktor utama yang menghambat pengembangan Desa Wisata Girimulyo sebagai destinasi unggulan. Menurut Hakim dkk. (2025) media sosial

berperan penting untuk promosi, komunikasi, dan interaksi dengan calon wisatawan. Namun, data dari Katalog Data Indonesia menunjukkan Desa Wisata Girimulyo belum memiliki akun pada *platform* populer seperti *YouTube*, *Instagram*, dan *TikTok*. Kondisi ini menurunkan visibilitas destinasi, terutama bagi generasi muda yang banyak bergantung pada media sosial saat mencari referensi wisata.

Minimnya promosi digital juga melemahkan penguatan citra destinasi, sehingga potensi lokal seperti Air Terjun Parang Ijo, kearifan lokal, dan daya tarik lain kurang dikenal serta kurang kompetitif dibandingkan destinasi yang lebih aktif berpromosi. Situasi tersebut turut mencerminkan bahwa pengelola dan pemerintah desa belum memfasilitasi promosi secara optimal, sementara media, pelaku usaha lokal, dan komunitas pariwisata juga belum dilibatkan secara aktif. Lemahnya koordinasi ini membuat potensi wisata desa belum tersosialisasi luas. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, pada Bab 2 Deskripsi Kondisi Wilayah Perdesaan juga menyatakan bahwa terdapat kendala dalam Pengembangan Kawasan Pedesaan Agrowisata Ngargoyoso, termasuk di dalamnya Desa Wisata Girimulyo, yaitu:

*“Meskipun populer di tingkat lokal, promosi Ngargoyoso di tingkat nasional dan internasional masih terbatas. Branding wisata juga masih terpecah-pecah antar destinasi, belum terintegrasi dalam satu citra besar”*. (Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2025).

Selain itu, di Desa Wisata Girimulyo juga belum terdapat paket wisata terintegrasi, sehingga kegiatan wisata masih berjalan secara parsial. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 60 Tahun 2025, bagian hal-

hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pariwisata Ngargoyoso, yang menyatakan bahwa:

*“Kurang nya integrasi antar destinasi sehingga wisatawan cenderung hanya mengunjungi satu atau dua lokasi saja tanpa melanjutkan ke destinasi lain”.*

*“Minim nya paket wisata terpadu yang menggabungkan atraksi alam, budaya, dan agro sehingga wisatawan kurang mendapatkan pengalaman menyeluruh”.*

Menurut Widyaningsih dkk. (2022) Ketiadaan media sosial dan lemahnya promosi tidak hanya menurunkan eksistensi Desa Wisata Girimulyo, tetapi juga memengaruhi persepsi atas kualitas dan daya tarik destinasi. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu penelitian yang menyatakan bahwa objek wisata Air Terjun Parang Ijo yang merupakan destinasi wisata andalan Desa Wisata Girimulyo dikategorikan dalam kategori "Kurang Menarik" (Pratidina , 2022). Kriteria ini diberikan karena kondisi objek wisata yang dinilai kurang indah, menurun tingkat keasriannya, dan keunikannya mulai berkurang akibat kurangnya pemeliharaan.

Faktor lain yang menyebabkan objek wisata ini masuk dalam kategori kurang menarik, yaitu keberadaan fasilitas pendukung yang tidak dalam kondisi yang optimal, sehingga secara keseluruhan Air Terjun Parangijo dianggap kurang mampu menarik minat wisatawan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa *stakeholders* yang terlibat, utamanya masyarakat dan kelompok pengelola belum diberdayakan secara optimal dalam pemeliharaan dan pengawasan fasilitas. Selain itu, pemerintah desa maupun Dinas Pariwisata kurang memberikan pembinaan, dukungan teknis, serta anggaran untuk pengelolaan berkelanjutan. Akibatnya, tanggung jawab pengelolaan belum berjalan secara partisipatif sebagaimana prinsip desa wisata yang menekankan keterlibatan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan pemberdayaan *stakeholder*, terutama masyarakat dan pengelola, belum optimal dalam pemeliharaan dan pengawasan fasilitas. Pada saat yang sama, dukungan pemerintah desa maupun dinas terkait masih terbatas dalam pembinaan, dukungan teknis, dan penganggaran untuk pengelolaan berkelanjutan. Tata kelola pariwisata di desa wisata belum menunjukkan praktik yang partisipatif sesuai prinsip pariwisata berbasis masyarakat, sehingga pelibatan pemerintah daerah, pengelola desa wisata, dan masyarakat lokal masih belum berjalan kuat dan merata.

**Tabel 1. 2 Kelas, kategori dan kriteria daya tarik wisata di Kabupaten Karanganyar**

<b>Kelas</b>	<b>Kategori</b>	<b>Kriteria Daya Tarik wisata</b>	<b>Nama tempat wisata</b>
1	Sangat menarik	Objek wisata masih asri, unik, khas, terpelihara dengan baik sehingga terlihat indah.	Grojogan sewu, Air terjun Jumog, telaga madirda.
2	Menarik	Objek wisata indah, unik, khas, buatan, terpelihara dengan baik walaupun sudah tidak asri lagi.	Candi cetho, Candi Suku, Sekipan, De Tjolomadoe
3	Cukup Menarik	Objek wisata cukup indah, unik, khas, serta cukup terpelihara, walaupun sudah tidak asri lagi.	Agro wisata Sondokoro, Astana Giribangun
4	Kurang Menarik	Objek wisata kurang indah, kurang keasrian serta keunikan juga ikut berkurang dan kurang terpelihara	Air terjun Parang Ijo.

Sumber: Pratidina, FLA. (2022)

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dalam bentuk desa wisata menjadi strategi dalam membangun pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu dasar hukum dalam pengembangan pariwisata desa di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018 tentang

Pedoman Umum Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, yang menekankan pentingnya peran aktif para *Stakeholders*, terutama masyarakat lokal, dalam seluruh tahapan pengembangan pariwisata, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga evaluasi. Permenpar No. 9 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengembangan desa wisata harus mengedepankan prinsip partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, keadilan distribusi manfaat, dan kolaborasi lintas sektor. Pada konteks ini, *Stakeholders* yang dimaksud mencakup pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, LSM, serta masyarakat lokal itu sendiri.

Permenpar No. 9 Tahun 2018 memperkuat urgensi mengenai pentingnya peran *stakeholders* dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Kurangnya peran *stakeholders* dalam melakukan branding dan promosi yang efektif, ketiadaan paket wisata, dan pengategorian objek wisata andalan Desa Wisata Girimulyo sebagai objek wisata kurang menarik akibat dari kurang terawat dan kurangnya fasilitas di objek wisata menunjukkan masih rendahnya peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo. Permasalahan dalam pengelolaan pariwisata tersebut seharusnya dapat diatasi dengan meningkatkan peran aktif *stakeholders*, baik dari pemerintah daerah, pengelola desa wisata, maupun masyarakat lokal. Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah Bagaimana bentuk pemetaan terhadap peran, tingkat pengaruh, dan kepentingan *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo Kabupaten Karanganyar?"

## **1.2 Identifikasi Masalah**

- 1.2.1 Kurang optimalnya promosi dan branding digital Desa Wisata Girimulyo *stakeholder* belum mampu membentuk kanal promosi resmi yang terintegrasi, sehingga visibilitas destinasi masih rendah dan promosi masih berjalan secara parsial.
- 1.2.2 Belum tersusunnya paket wisata terintegrasi di Desa Wisata Girimulyo yang mengintegrasikan atraksi alam, budaya, dan agro, sehingga kegiatan wisata berjalan parsial dan kunjungan wisatawan cenderung berhenti hanya pada satu dua lokasi.
- 1.2.3 Air Terjun Parang Ijo sebagai destinasi utama Desa Wisata Girimulyo, diklasifikasikan sebagai objek wisata dengan daya tarik wisata kurang menarik. Kondisi objek wisata kurang terpelihara dan kurang mendapat perhatian pemerintah, meskipun fasilitas tersedia secara lengkap namun tidak memadai dan dalam kondisi buruk.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana pemetaan *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo, Kabupaten Karanganyar?
- 1.3.2 Bagaimana posisi masing-masing *stakeholders* berdasarkan analisis *power and interest* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo, Kabupaten Karanganyar?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

**1.4.1** Mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo

**1.4.2** Mengidentifikasi dan menganalisis posisi *stakeholder* berdasarkan tingkat *power* dan *interest* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu administrasi, terkhusus pada manajemen publik yang memiliki kaitan erat dengan pengembangan desa wisata. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi penelitian serupa di masa mendatang, khususnya pada pihak yang ingin mempelajari mengenai pembagian peran (*stakeholders mapping*) dalam Pengembangan pariwisata khususnya dalam konteks desa wisata.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### 1. Bagi Desa Wisata Girimulyo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa saran, pemikiran, dan informasi bermanfaat bagi pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo, Kabupaten Karanganyar.

#### 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta implementasi ilmu administrasi, terkhusus yang berhubungan dengan proses pengembangan desa wisata.

#### 3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan tambahan atau pengembangan ide baru untuk penelitian serupa. Selain itu, hasil tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan pariwisata desa lainnya.

## **1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.6.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dikaji difokuskan pada analisis pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Iswanto & Puspitasari (2024) meneliti berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata Pulau Derawan, Kalimantan Timur, melalui studi kasus kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pemerintah daerah, pengusaha pariwisata, masyarakat lokal, serta LSM lingkungan. Temuan menunjukkan peran esensial pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi pariwisata berkelanjutan, beserta kebutuhan kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Masrurun & Nastiti (2023) mengidentifikasi serta mengelompokkan pemangku kepentingan pembangunan kawasan strategis pariwisata menggunakan metode kualitatif berbasis wawancara mendalam dan observasi. Hasilnya mengungkap tiga kelompok utama yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta yang berperan krusial dalam pengembangan pariwisata, dengan penekanan pada kolaborasi serta komunikasi antar pemangku kepentingan demi keberhasilan kawasan pariwisata.

Wulandari dkk. (2024) mengidentifikasi 27 pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pengembangan taman rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa komunikasi dan kolaborasi yang kurang antara pemangku kepentingan menghambat revitalisasi taman. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengoptimalkan Pengembangan objek wisata. Di sisi lain, Rahmalia & Rahman (2025) mengidentifikasi empat jenis pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan ekowisata. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan koordinator, serta peran masyarakat dan akademisi dalam mendukung pengembangan ekowisata berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Sejalan dengan penelitian di atas, Astuti dkk. (2023) melakukan penelitian dan mengidentifikasi tiga kelompok pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pengembangan wisata Telaga Menjer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menemukan bahwa Pengembangan wisata belum optimal karena kurangnya sinergi antara pemangku kepentingan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan Pengembangan wisata. Melanjutkan kajian pemangku kepentingan pengembangan pariwisata berkelanjutan, Finda dkk. (2024) meneliti berbagai aktor terlibat dalam pengembangan kawasan wisata Candi Borobudur melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara dan analisis dokumen. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, masyarakat lokal, serta pengusaha pariwisata esensial untuk menjaga keberlanjutan kawasan tersebut. Penelitian ini

juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam pengembangan, seperti konflik kepentingan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, Armanda dkk. (2024) meneliti pengembangan pariwisata halal di Sabang, Aceh, dengan menekankan partisipasi pemangku kepentingan yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya pariwisata secara efektif. Pendekatan kualitatif menggunakan observasi lapangan, wawancara, serta diskusi kelompok fokus mengungkap potensi besar sumber daya alam dan warisan budaya Islam Sabang untuk pariwisata halal, yang memerlukan kerja sama kuat antar pemangku kepentingan guna mencapai keberlanjutan.

Saniti & Rahardyan (2022) melakukan penelitian serupa mengenai Pengembangan sampah berbasis partisipasi masyarakat di Kota Bandung, mengidentifikasi peran penting masyarakat dalam pengelolaan limbah dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan analisis pemangku kepentingan dan teknik pemetaan untuk menggambarkan kondisi saat ini dari pengelolaan sampah. Temuan mereka menunjukkan bahwa pemerintah masih menjadi institusi paling sentral dalam jaringan pengelolaan sampah, sementara lembaga komunitas formal memiliki potensi besar untuk bermitra. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan peran mereka dalam pengelolaan sampah, yang mengakibatkan sistem pengelolaan yang tidak efektif. Selain itu, Rahmanita dkk. (2022) melakukan analisis pemangku kepentingan dalam Pengembangan ekowisata di Siberut Selatan, Kepulauan Mentawai. Penelitian ini mengidentifikasi dua belas lembaga yang mewakili berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, komunitas, bisnis, dan akademisi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa separuh dari pemangku kepentingan memiliki minat tinggi, tetapi hanya sedikit yang memiliki pengaruh signifikan dalam Pengembangan ekowisata. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kolaborasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekowisata.

Kajian lain oleh Tamrin dkk. (2024) meneliti analisis stakeholder dalam tata kelola ekowisata Pantai Dalegan, Gresik, berdasarkan kekuasaan dan kepentingan aktor. Penelitian ini mengidentifikasi stakeholder primer, sekunder, dan kunci yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Temuan Tamrin dkk. menunjukkan pemerintah desa sebagai aktor kunci dan komunitas lokal berperan utama dalam pengelolaan. Penelitian Finda dkk. (2024) tentang penerapan *Community Based Tourism* (CBT) di Desa Wisata Karangrejo, Borobudur, mengungkap dampak positif pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal terhadap dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kajian tersebut menekankan pemetaan pemangku kepentingan guna menghindari tumpang tindih peran, meningkatkan kolaborasi, serta memperkuat keberhasilan implementasi CBT di desa wisata.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, terdapat kesamaan topik pembahasan mengenai analisis *stakeholder* atau pemetaan *stakeholder* dalam upaya mengembangkan pariwisata. Selain kesamaan, terdapat kebaruan penelitian berupa penggunaan teori *Powers and Interest* dari Ackerman dan Eden (2011) dalam Widyaningrum (2024) sebagai kerangka analisis utama. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya mengadopsi teori partisipasi maupun teori CBT dan lebih fokus pada pemetaan pemangku kepentingan serta

peran mereka atau faktor pendorong dan penghambat dalam konteks tersebut, penelitian ini secara khusus menggali dinamika kekuatan dan kepentingan (*powers and interest*) dari para pemangku kepentingan. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi dan pengaruh masing-masing *stakeholders*, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.

Tabel 1. 3 PENELITIAN TERDAHULU

NO	PENELITI/ TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN INI
1.	Denny Iswanto, Laely Harum Puspitasari., (2024)	Melakukan analisis <i>Stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pulau Derawan	<i>Stakeholders Analysis Theory</i> (Freeman & McVea, 2005)	Deskriptif kualitatif	Pengembangan pariwisata Pulau Derawan melibatkan pihak pemerintah pusat dan daerah, Pokdarwis, pengelola wisata, dan lembaga lingkungan. Pemerintah daerah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengusaha mendorong kontribusi ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, masyarakat menjaga budaya dan lingkungan, sedangkan lembaga lingkungan berfungsi sebagai pengawas keberlanjutan ekosistem.	Penelitian terdahulu berlokasi di Pulau Derawan dengan <i>Stakeholders Analysis</i> dan isu ekosistem, sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Wisata Girimulyo dengan fokus <i>Triple Helix</i> dan <i>power-interest grid</i> pada desa wisata rintisan.
2.	Zam Zam Masrurun, Dyah Meutia Nastiti., (2023)	Mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menguraikan relasi antar- <i>stakeholders</i> dalam pengembangan kawasan pariwisata strategis Kabupaten Wonosobo.	<i>Stakeholders Mapping Theory</i> (Reed et al, 2009)	Deskriptif kualitatif	Penelitian mengidentifikasi 28 pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan kuat dengan pembangunan kawasan tersebut. Di antaranya, tiga aktor utama berfungsi sebagai <i>key player</i> dengan peran dan keterlibatan paling sentral, dua aktor lain masuk kategori <i>subject</i> , lima aktor menjadi <i>context setter</i> , sementara 18 aktor tersisa tergolong <i>crowd</i> .	Penelitian terdahulu mengkaji kawasan pariwisata strategis skala kabupaten, sedangkan penelitian ini memetakan <i>stakeholder</i> pada satu desa wisata (Girimulyo) dengan konteks <i>governance</i> desa.
3.	Tuti Wulandari,	Memberikan identifikasi terkait stakeholdrs yang	<i>Pentahelix Model Theory</i>	Deskriptif kualitatif	Sebanyak 27 pemangku kepentingan dilibatkan, diklasifikasikan ke dalam	Penelitian terdahulu menggunakan model

	Tri Yuniningsih., (2024)	terlibat serta perannya dalam Pengembangan objek wisata Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Rembang	(Arif Yahya, 2019)		peran sebagai pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana, dan akselerator. Pemetaan pemangku kepentingan menggunakan model konsep pentahelix, yang meliputi pemerintah, media, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat.	<i>Pentahelix</i> di objek wisata pantai, sementara penelitian ini menggunakan pola <i>Triple Helix</i> dan <i>power interest</i> pada desa wisata pegunungan Girimulyo.
4.	Dyahayu Rizka Rahmalia, Amni Zarkasyi Rahman., (2025)	Mengidentifikasi dan menganalisis pemetaan <i>Stakeholders</i> terkait kepentingan dan pengaruh serta peran yang dilakukan para <i>Stakeholders</i> di dalam proses kerjasama pengembangan Desa Wisata Glawan menjadi wisata <i>ecotourism</i> berkelanjutan.	Teori model jejaring <i>Stakeholders</i> yaitu Model Quintuple Helix (Carayannis dan Campbell, 2010)	Deskriptif Kualitatif	Teridentifikasi empat jenis <i>Stakeholders</i> : Pemerintah, Industri, Akademisi, dan Masyarakat. Pemerintah. Industri sebagai <i>keyplayers</i> , <i>subjects</i> , <i>policy creator</i> , dan <i>facilitator</i> . Akademisi sebagai <i>keyplayers</i> , <i>facilitator</i> , dan <i>coordinator</i> . Sementara itu, masyarakat terdiri atas Pokdarwis ( <i>keyplayers</i> ), Pengelola Rumah Wisata Edukasi ( <i>context setter</i> ), Ibu PKK, dan Pemuda Karang Taruna ( <i>subjects</i> ), yang seluruhnya berperan sebagai <i>implementor</i> dan <i>accelerator</i> .	Penelitian terdahulu berbasis <i>Quintuple Helix</i> dan <i>ecotourism</i> Desa Glawan, sedangkan penelitian ini fokus pada pemetaan primer-kunci-sekunder di Desa Wisata Girimulyo.
5.	Ratih Widya Astuti, Retno Sunu Astuti, Amni Zakarsyi Rahman., (2023)	Mengidentifikasi para pemangku kepentingan ( <i>Stakeholders</i> ) dan peran mereka dalam Pengembangan objek wisata Telaga Menjer di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo.	Teori <i>Stakeholders</i> (freeman, 1984) dan teori <i>Stakeholders mapping</i> (WHO, 2007)	Deskriptif Kualitatif	Konsep <i>triple helix</i> diterapkan dalam pengembangan Telaga Menjer melalui keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas. Klasifikasi pemangku kepentingan mencakup kategori primer, kunci, serta pendukung, yang dipetakan dalam matriks <i>power-interest</i> menjadi <i>context setter</i> , <i>players</i> , dan <i>subject</i> . Pembagian peran mereka	Penelitian terdahulu menerapkan <i>Triple Helix</i> pada Telaga Menjer, sementara penelitian ini menerapkan <i>Triple Helix</i> dan <i>power interest</i> pada desa wisata rintisan Girimulyo dengan aktor lokal seperti Karang Taruna dan UMKM.

					terdiri atas lima fungsi: pembuat kebijakan, pelaksana, koordinator, fasilitator, dan akselerator.	
6.	Dicky Armanda, dkk., (2024)	Menilai ketersediaan dan kelayakan situs serta rute halal di Kota Sabang, serta mengembangkan kerangka kerja lima poin untuk pemangku kepentingan pariwisata dalam mengelola destinasi melalui regulasi, konservasi, dan penciptaan lapangan kerja.	Teori Partisipasi Pemangku Kepentingan (Byrd, 2021) Dan Teori Sistem Sosial-Ekologis (Clifton dan Amran, 2020)	Teknik kualitatif: observasi lapangan, diskusi kelompok fokus, dan wawancara	Sabang memiliki potensi besar untuk pengembangan pariwisata halal melalui sumber daya alam dan warisan Islam. Partisipasi pemangku kepentingan sangat penting untuk keberlanjutan. Kerangka kerja lima poin dapat membantu Pengembangan destinasi melalui regulasi dan konservasi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan wisatawan juga diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).	Penelitian terdahulu berfokus pada pariwisata halal dan kerangka sosial ekologis di Kota Sabang, sedangkan penelitian ini pada pariwisata desa umum dengan kerangka <i>governance</i> dan <i>stakeholder mapping</i> di Girimulyo.
7.	Dian Saniti, Benno Rahardyan.	Mengidentifikasi dan memetakan posisi pelaku yang berpengaruh dalam jaringan Pengembangan sampah berbasis masyarakat di Kota Bandung berdasarkan penilaian kelembagaan masyarakat	Teori Kapasitas Komunitas (Chaskin et al., 2001) dan Teori Partisipasi Masyarakat (Goodman et al., 1998)	Deskriptif Kualitatif	Pemerintah Kota Bandung adalah lembaga paling sentral dalam Pengembangan sampah berbasis masyarakat, sementara lembaga komunitas formal memiliki potensi besar sebagai mitra. Namun, terdapat masalah utama berupa kurangnya regenerasi di lembaga dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang peran mereka, yang menghambat keberlanjutan sistem Pengembangan sampah.	Penelitian terdahulu memiliki objek pengelolaan sampah berbasis masyarakat di kota, sementara penelitian ini berfokus pada pengembangan desa wisata dan pemetaan <i>stakeholder</i> pariwisata di tingkat desa.
8.	Myrza Rahmanita, dkk., (2022)	Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan pengembangan	<i>Stakeholders Theory</i> (Freeman,	Deskriptif Kualitatif	identifikasi pemangku kepentingan pengembangan ekowisata Siberut Selatan Kepulauan Mentawai	Penelitian terdahulu mengaji ekowisata Siberut Selatan secara

		ekowisata untuk diklasifikasikan dan disusun dalam matriks berdasarkan tingkat pengaruh dan minatnya	1984) dan <i>Stakeholders Mapping Theory</i> (Ackerman & Eden, 2011)		mengungkap 12 lembaga dari empat unsur: empat dari pemerintah, dua dari bisnis, lima dari komunitas, serta satu dari akademik.	umum, sedangkan penelitian ini memetakan <i>stakeholder</i> desa wisata rintisan Girimulyo dengan kombinasi <i>Triple Helix</i> dan <i>power interest grid</i> .
9.	M. Husni Tamrin., dkk. (2023)	Memahami siapa saja yang terlibat, bagaimana peran mereka, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan pengelolaan ekowisata Pantai Dalegan.	<i>Stakeholder Theory</i> (Freeman, 1984)	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan ekowisata melibatkan tiga jenis <i>stakeholder</i> , dengan pemerintah desa sebagai aktor utama, sementara peran pihak lain belum optimal meski sudah memberi manfaat ekonomi.	Penelitian terdahulu menggunakan basis teori <i>Stakeholder Theory</i> (Freeman, 1984), sedangkan penelitian ini menggunakan teori klasifikasi <i>stakeholders</i> dan <i>power and interest</i> dalam pengembangan pariwisata
10.	Finda Elfa Aulia, dkk. (2024)	Tujuan penelitian mencakup pemetaan aktor dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat Desa Wisata Karangrejo menurut fungsi dan tanggung jawabnya, evaluasi kontribusi per aktor, serta identifikasi strategi kolaborasi untuk optimalisasi efektivitas pengembangan pariwisata	Teori <i>Community Based Tourism</i> (Jamal & Stronza, 2009)	Metode Kualitatif	Dampak positif implementasi CBT Desa Wisata Karangrejo terlihat pada aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Pemangku kepentingan yang terlibat meliputi masyarakat setempat, aparat pemerintah desa serta daerah, pelaku swasta, dan organisasi internasional, dengan variasi <i>power, interest</i> , serta peran masing-masing.	Penelitian terdahulu menitikberatkan CBT dan strategi kolaborasi di Desa Wisata Karangrejo, sedangkan penelitian ini menonjolkan klasifikasi primer, kunci, sekunder dan posisi kuadran <i>stakeholder</i> di Desa Wisata Girimulyo.

Sumber: Dari berbagai sumber (diolah peneliti, 2026)

## **1.6.2 Kerangka Teori**

### **1.6.2.1 Administrasi Publik**

*Administratie* dalam bahasa Belanda merujuk pada proses pembuatan catatan, korespondensi, serta tugas-tugas ketatausahaan pendukung manajemen. Istilah administrasi juga menggambarkan pengumpulan serta pencatatan informasi secara sistematis untuk menyediakan data dan memudahkan pengambilan dokumen yang dibutuhkan. Administrasi menurut A. Dunsire dalam Keban (2014) meliputi aktivitas mengarahkan, mengatur, menjalankan tugas, menyediakan panduan, membangun prinsip eksekusi kebijakan publik, menganalisis, menimbang serta mempresentasikan keputusan, memilih opsi kebijakan, dan merupakan usaha perorangan atau kelompok untuk menyediakan layanan serta barang publik. Selain itu, administrasi juga mencakup ranah kerja di dunia akademik dan teoritis.

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014) administrasi publik merupakan serangkaian tahapan yang mengatur dan menyelaraskan anggota publik dan sumber daya dalam upaya untuk melakukan perumusan, pengembangan, dan pelaksanaan keputusan-keputusan yang menyangkut kebijakan publik. Adapun tujuan administrasi publik sebagai suatu bidang studi adalah untuk melakukan pemecahan atas masalah masalah yang terjadi di masyarakat dengan melakukan peningkatan atau perbaikan terutama dalam hal keuangan, sumber daya manusia, dan organisasi. McCurdy dalam Keban (2014) memiliki berbagai pandangan mengenai administrasi dalam karyanya, menekankan bahwa administrasi publik bisa dipahami sebagai suatu proses politik. Administrasi publik bukan hanya sebagai metode untuk mengelola suatu negara, tetapi juga sebagai pendekatan

fundamental dalam rangka menjalankan berbagai macam fungsi negara. Dapat dikatakan bahwa tidak hanya aspek manajerial yang dilibatkan dalam administrasi publik, melainkan juga terdapat adanya dimensi politik.

Kettl dalam Keban (2014) menjelaskan bahwa istilah “birokrasi” kerap dipakai untuk merujuk administrasi publik karena lebih mudah dipahami dan diamati oleh masyarakat. Istilah “publik” sendiri dapat bermakna masyarakat luas (berbeda dari individu) sekaligus aparatur yang mengemban pelayanan kepentingan umum. Barton dan Chappel dalam Keban (2014) memaknai administrasi publik sebagai pekerjaan/aktivitas pemerintah, dengan penekanan pada peran pegawai dalam memberikan layanan kepada warga. Sementara itu, Nicholas Henry dalam Keban (2014) membatasi administrasi publik sebagai perpaduan kompleks antara teori dan praktik untuk memperdalam pemahaman relasi negara dan masyarakat serta mendorong kebijakan publik yang lebih responsif terhadap tuntutan sosial, dengan memadukan proses manajemen dan nilai moral masyarakat

Kuhn dalam Keban (2014) berpendapat bahwa ilmu administrasi publik terus berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perubahan kebutuhan dan relevansinya. Paradigma administrasi publik digunakan untuk menjelaskan perkembangan disiplin ini, yaitu sebagai kerangka nilai, perspektif, prinsip, pendekatan, atau strategi dalam merespons suatu isu yang diyakini komunitas ilmiah pada periode tertentu, ketika cara pandang itu menghadapi krisis atau tantangan, kepercayaan terhadapnya dapat berkurang atau memudar.

Menurut Robert Golembiewski, paradigma administrasi publik dapat dianalisis melalui dua dimensi yaitu fokus dan lokus. Fokus menunjuk pada inti

kajian administrasi publik, masalah yang dibahas serta pendekatan/solusi yang ditawarkan, misalnya proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik maupun strategi pengelolaan organisasi pemerintahan. Lokus merujuk pada ruang lingkup tempat persoalan itu terjadi, baik dalam konteks kelembagaan, wilayah, maupun tingkat pemerintahan (lokal, regional, nasional), sehingga konteks masalah turut menentukan pendekatan penyelesaiannya.

Paradigma administrasi publik memiliki fokus utama pada kebijakan publik dan manajemen publik sebagai dua pilar sentral. Kebijakan publik menyoroti proses pembuatan keputusan yang berdampak luas bagi masyarakat, sementara manajemen publik menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan tersebut melalui fungsi-fungsi manajerial dalam sektor publik, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Adapun dalam penelitian ini, posisi kajian berada pada ranah manajemen publik, yang berarti perhatian diarahkan pada bagaimana suatu program atau kebijakan dikelola secara efektif dan efisien oleh aparatur pemerintah, khususnya dalam konteks pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada aspek implementatif dan manajerial dari administrasi publik dalam menyikapi dinamika dan kebutuhan masyarakat.

#### **1.6.2.2 Manajemen Publik**

Secara etimologis, manajemen publik tersusun dari kata “manajemen” dan “publik”. Proses manajemen menurut Stoner dalam Satibi (2023) mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kerja organisasi serta pemanfaatan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan. Menurut KBBI, “publik” bermakna masyarakat/umum, orang banyak, atau rakyat. Tangkilisan memetakan “publik” sebagai umum, masyarakat, dan negara. Pasolong menyederhanakan manajemen publik sebagai manajemen pada lembaga pemerintah, yakni upaya mengelola institusi pemerintah secara terarah.

Satibi (2023) memandang manajemen publik sebagai pengelolaan oleh lembaga pemerintah terhadap sektor-sektor umum melalui fungsi perencanaan, pengelompokan, penyusunan strategi, pengendalian, dan evaluasi berbagai sumber daya (anggaran, teknologi, infrastruktur, SDM, dan sumber daya lain) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara historis, fondasi manajemen publik dipengaruhi gagasan Woodrow Wilson yang merangkum empat prinsip yang ikut membentuk perkembangannya, yakni pemerintah sebagai lingkungan utama organisasi, penekanan pada fungsi eksekutif, peningkatan kapasitas administrasi melalui teknik manajemen yang efisien dan pencarian prinsip-prinsip, serta penggunaan metode komparatif dalam studi administrasi publik.

### **1.6.2.3 Paradigma Manajemen Publik**

Berubahnya paradigma yang digunakan dapat dijadikan alat untuk menelusuri adanya perkembangan dari suatu disiplin ilmu. Paradigma didefinisikan sebagai suatu nilai, cara pandang, prinsip dasar, metode, atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Keberadaan cara pandang tersebut diyakini oleh suatu kelompok ilmiah pada masa tertentu. Apabila krisis maupun tantangan melanda suatu cara pandang, maka akan menimbulkan berkurang atau bahkan lunturnya kepercayaan terhadap cara pandang tersebut (Kuhn dalam Keban, 2014). Cheema dalam Keban (2014) membagi manajemen publik menjadi empat tahapan

utama, yang sekaligus mencerminkan evolusi paradigma administrasi publik.

Keempat tahapan itu meliputi:

a. *Old Public Administration (OPA)*

Paradigma *Old Public Administration (OPA)* berakar dari pemikiran Woodrow Wilson yang menekankan pemisahan antara politik dan administrasi, di mana administrasi publik dianggap netral dan teknokratis. Paradigma ini memiliki fokus utama administrasi adalah pada penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah, dengan peran terbatas dalam perumusan kebijakan. Administrasi lebih diarahkan pada fungsi-fungsi pelaksanaan seperti perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran, serta dijalankan secara birokratis, hierarkis, dan berorientasi pada efisiensi dan kepatuhan terhadap prosedur.

b. *New Public Management (NPM)*

Paradigma *New Public Management (NPM)* merupakan fase yang lebih berfokus pada fleksibilitas, pemerolehan hasil, pengukuhan, dan inovasi, termasuk di dalamnya mencakup kontrak dan praktik *outsourcing*, serta melakukan promosi terhadap etika dalam manajemen dan profesi, maupun anggaran berlandaskan performa bisnis. paradigma ini menghadapi banyak tantangan, yang kemudian memunculkan paradigma baru yaitu *New Public Service (NPS)*.

c. *New Public Service (NPS)*

Paradigma ini diperkenalkan oleh Denhardt sebagai respons terhadap dominasi paradigma *New Public Management (NPM)* yang cenderung

membawa unsur bisnis ke dalam sektor publik, terutama dalam praktik pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan NPS berbeda dari NPM yang fokus pada efisiensi, persaingan, serta orientasi pasar, karena NPS lebih menitikberatkan pelayanan publik pada kepentingan warga negara ketimbang sekadar kepuasan konsumen. Pada paradigma NPS, peran pemerintah bukan seperti perusahaan penyedia jasa, melainkan sebagai pendukung yang memastikan pemenuhan hak masyarakat serta mendorong keterlibatan aktif rakyat dalam pengambilan kebijakan publik.

d. *Governance*

Paradigma *Governance* merupakan fase yang menciptakan adanya kebijakan, lembaga, dan sistem nilai. Di fase ini, hubungan antara pemerintah bersama dengan sektor swasta dan masyarakat merupakan pihak yang mengelola segala kepentingan politik, ekonomi, dan sosial. Proses dan mekanisme merupakan sesuatu yang diutamakan dalam paradigma ini, di mana kelompok maupun masyarakat secara individu dapat menyuarakan kepentingan mereka, meredakan konflik, dan memenuhi hak dan tanggung jawab mereka.

Berdasarkan paradigma yang telah bergeser pada uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini tergolong ke dalam paradigma pada fase keempat, yaitu paradigma *Governance*, karena fokus pada pemetaan *stakeholders* dalam Pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang menekankan kolaborasi, partisipasi, dan koordinasi antara berbagai aktor, yaitu masyarakat lokal, pemerintah desa, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya.

#### 1.6.2.4 *Governance*

Secara umum, *Governance* dapat dipahami sebagai transformasi dalam pengelolaan kebijakan publik yang tidak lagi terpusat semata pada pemerintah, melainkan mengajak keterlibatan berbagai pihak lain seperti masyarakat, sektor swasta, dan aktor terkait lainnya (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020). *Governance* muncul sebagai paradigma baru dalam pengaturan pemerintahan, didasari tiga fondasi utama yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat. Paradigma lama berupa *government* menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya pengelola urusan negara. Pergeseran dari *government* menuju *governance*, yang mengutamakan kerja sama setara dan seimbang antar pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil, melahirkan konsep administrasi publik modern bernama *good governance*. *Good governance* mencerminkan interaksi saling melengkapi dan produktif antara negara, swasta, dan masyarakat. Konsep ini menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan unggul, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, serta penerimaan luas dari masyarakat. (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020).

Terdapat 3 isu yang menjadi perhatian dalam kajian mengenai *governance* (Astuti dkk., 2020). Isu-isu tersebut, antara lain:

- 1) Dimensi kelembagaan meliputi pelibatan banyak partisipan (*multi-Stakeholders*) untuk merespons kebutuhan dan permasalahan warga negara;
- 2) Dimensi nilai meliputi landasan yang digunakan dalam kekuasaan, baik nilai-nilai administrasi publik tradisional, efisiensi dan efektivitas, serta keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan;

- 3) Dimensi proses meliputi keterkaitan antara unsur pemerintah, masyarakat, dan badan usaha untuk menanggapi permasalahan publik

Dari uraian sebelumnya, penelitian ini termasuk dalam ranah dimensi kelembagaan, dengan penekanan pada pemetaan *stakeholders* yang berperan dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Girimulyo, Kabupaten Karanganyar. Kajian ini dimaksudkan untuk mengenali beragam aktor yang terlibat dalam proses pengembangan pariwisata desa itu, sekaligus memetakan peran serta tanggung jawab tiap *stakeholders*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan menggali dinamika interaksi antar *Stakeholders*, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana kolaborasi di antara mereka dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif pariwisata berbasis masyarakat.

#### **1.6.2.5 Stakeholders Mapping**

*Stakeholders Mapping* terdiri dari dua kata, yaitu *Stakeholders* (pemangku kepentingan) dan *mapping* (pemetaan). *Stakeholders* didefinisikan WHO sebagai pihak yang bisa terdampak secara langsung maupun tidak langsung dari suatu proses maupun hasilnya. Ackerman dan Eden juga mendefinisikannya sebagai individu atau kelompok kecil yang memiliki kuasa untuk merespons, bernegosiasi, serta memengaruhi arah strategis organisasi ke depan. (Ackerman dan Eden, 1998) dalam Widyaningrum (2024) menjelaskan bahwa *stakeholders* meliputi semua pihak di masyarakat baik individu, kelompok masyarakat, atau komunitas yang punya keterkaitan dan kepentingan pada isu atau persoalan dalam organisasi maupun lingkungannya. (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020). *Stakeholders* atau pemangku kepentingan dapat disimpulkan sebagai individu atau kelompok yang

perlu didukung agar organisasi mencapai kemakmuran dan keberlanjutan. Mereka terdiri dari berbagai pihak yang berelasi dengan pengelolaan sumber daya. *Stakeholders* memiliki kepentingan, tuntutan, dan pandangan yang berbeda beda, pengelolaan *stakeholders* yang baik sangat krusial untuk meraih tujuan organisasi.

Menurut Maryono, dkk (2005) dalam Astuti dkk. (2023), *Stakeholders* dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. *Stakeholders* primer

*Stakeholders* primer adalah pihak yang mengalami dampak langsung, baik positif atau negatif, dari suatu rencana serta punya keterkaitan kepentingan erat dengan aktivitas itu. Sebagai pemilik kepentingan, posisi *stakeholders* primer wajib dipertimbangkan dalam setiap keputusan yang dibuat. Pada setiap tahapan-tahapan kegiatan, *Stakeholders* primer harus dilibatkan penuh karena berperan penting, serta harus dilibatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan atas sebuah permasalahan.

2. *Stakeholders* kunci

*Stakeholders* kunci merupakan pihak yang mempunyai kewenangan legal dalam aspek pengambilan keputusan atau pihak yang memiliki pengaruh kuat dan penting berkaitan kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan yang dilakukan. *Stakeholders* tersebut merupakan elemen eksekutif dalam organisasi.

3. *Stakeholders* sekunder atau pendukung

*Stakeholders* pendukung adalah *Stakeholders* yang tidak berkepentingan langsung terhadap suatu rencana. Namun, mempunyai kepedulian besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholders* pendukung menjadi fasilitator dan memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam proses pengembangan suatu kegiatan.

Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian ini mengklasifikasikan *Stakeholders* menjadi tiga, meliputi *Stakeholders* primer, *Stakeholders* sekunder atau pendukung, dan *Stakeholders* kunci.

Salah satu isu terkait studi *governance* adalah isu mengenai kelembagaan yang berhubungan dengan pemangku kepentingan dan perannya dalam pencapaian suatu tujuan. Analisis mengenai pemangku kepentingan dan perannya selanjutnya dikenal dengan *Stakeholders* mapping (pemetaan *stakeholders*). *Stakeholders* mapping (pemetaan *Stakeholders*) didefinisikan sebagai metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan posisi, kewenangan, dan kepentingan *Stakeholders* yang terlibat dalam persoalan atau kepentingan tertentu (Astuti, Astuti, & Rahman, 2023). Definisi lain menurut *Bussines Social for Responsibility*, 2011 dalam (Astuti, Astuti, & Rahman, 2023), *Stakeholders mapping* merupakan kombinasi antara proses, penelitian, dan pembahasan yang mendeskripsikan sudut pandang berulang-ulang untuk mendapatkan urutan kunci dari semua *stakeholders* yang ada. Ackermann dan Eden dalam Rahmanita, dkk (2022) mengartikan analisis pemangku kepentingan sebagai rangkaian proses yang mencakup tiga langkah utama, yaitu mengenali para pemangku kepentingan, menganalisis relasi antar

pihak tersebut sambil membangun kemungkinan koalisi, serta mengilustrasikan pengaruh dan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan.

Pemetaan *stakeholders* esensial untuk mengurai tujuan pokok suatu masalah atau isu terkait, serta memperjelas proses identifikasi *stakeholders* itu sendiri.

Manfaat dari pemetaan *stakeholders* adalah untuk mengetahui:

1. Pihak mana yang terdampak
2. Kelompok mana yang berpotensi memengaruhi proses atau hasil kegiatan
3. Pihak mana yang wajib dilibatkan
4. Kapasitas pihak mana yang harus ditingkatkan agar aktif terlibat dalam kegiatan.

Pemetaan *stakeholders* mendukung evaluasi lingkungan kegiatan serta cara negosiasi terbaik dalam diskusi terkait. Pemetaan *stakeholders* menghasilkan beberapa output antara lain:

- a. Deskripsi mengenai kepentingan *stakeholders* yang berkaitan dengan perumusan atau implementasi kebijakan;
- b. Identifikasi adanya potensi konflik antar *stakeholders* karena terdapat perbedaan kepentingan dan dapat memberikan ancaman terhadap keberhasilan implementasi kebijakan,
- c. Membantu melakukan pemetaan struktur relasi antara *stakeholders* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kerjasama atau koalisi;
- d. Membantu merumuskan jenis partisipasi yang diharapkan dari *stakeholders* yang berbeda.

### 1.6.2.6 Pemetaan *Stakeholders* dengan Analisis *Triple Helix*, *Quadra Helix*, dan *Penta Helix*

Terdapat beberapa model pemetaan *stakeholders* yang dapat digunakan untuk memahami dinamika hubungan antar pemangku kepentingan, di antaranya adalah model *triple helix*, *quadra helix*, dan *penta helix*. Model *triple helix* mengutamakan keterkaitan komprehensif antara tiga unsur inti yaitu ilmu pengetahuan, sektor industri atau perdagangan, serta pemerintahan. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi antara ketiga sektor tersebut untuk mendorong inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, model *quadra helix* menambahkan satu elemen penting, yaitu masyarakat madani (*civil society*), ke dalam kerangka pemetaan. Penambahan masyarakat sebagai *Stakeholders* dapat menciptakan ruang bagi partisipasi publik dan memperkuat keterlibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Terakhir, model *penta helix* menyempurnakan konsep sebelumnya dengan menambahkan media massa (*mass media*) sebagai elemen kelima. Media berperan penting dalam menyebarkan informasi, membangun kesadaran, dan memfasilitasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020).

**Tabel 1. 4 Pemetaan *Stakeholders Triple Helix, Quadra Helix, dan Penta Helix***

<i>Triple Helix</i>	<i>Quadra Helix</i>	<i>Penta Helix</i>
Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah ( <i>Government</i> )
Bisnis	Bisnis	Dunia Usaha ( <i>Business</i> )
Akademisi	Akademisi	Akademisi ( <i>Academician</i> )
	Organisasi Non Pemerintah/ <i>Civil Society</i>	Organisasi Non Pemerintah ( <i>NGO/ Civil Society</i> )
		Media Massa ( <i>Mass Media</i> )

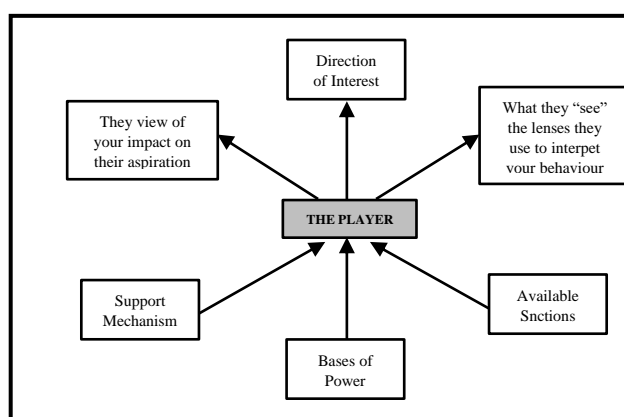
Sumber: (Astuti, Warsono, & Rachim, 2020)

### 1.6.2.7 Teknik Stakeholders Mapping

Terdapat beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam melakukan analisis *Stakeholders mapping*, di antaranya:

#### 1. *Bases of Power and Direction of Interest Diagram*

Diagram ini dirancang untuk menganalisis sumber atau basis kekuasaan dan kepentingan yang ingin dicapai oleh pemangku kepentingan. Kekuasaan (*power*) dapat berasal dari berbagai sumber, seperti akses terhadap anggaran, pendanaan, dukungan publik, atau kontrol atas berbagai jenis sanksi, seperti kewenangan untuk mengatur atau memberikan suara di parlemen. Sementara itu, arah kepentingan (*directions of interest*) menggambarkan sejauh mana pemangku kepentingan memiliki kepentingan terhadap organisasi. Ada dua alasan utama untuk menyusun diagram ini. Pertama, untuk memahami kesamaan sumber kekuasaan di antara para pemangku kepentingan. Kedua, untuk mengetahui bagaimana pemangku kepentingan akan memajukan kepentingan mereka dengan memanfaatkan kekuasaan yang mereka miliki.



**Gambar 1. 6 *Bases of Power-Direction of Interest Diagram***

Sumber: Bryson (2004) dalam Noor dkk. (2022)

## **2. Policy Implementation Mapping**

Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat bergantung pada pemahaman yang mendalam tentang pemangku kepentingan, baik yang mendukung maupun yang menentang. Untuk itu, kelompok-kelompok ini perlu dianalisis dengan baik dalam beberapa aspek berikut:

- a. **Kepentingan:** Identifikasi hal-hal yang diperjuangkan atau dianggap penting oleh pemangku kepentingan, sehingga dapat memahami motivasi mereka.
- b. **Sumber Daya:** Mengetahui sumber daya apa yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan mereka, seperti dana, jaringan, atau keahlian.
- c. **Channel:** Memahami saluran atau cara yang akan digunakan oleh pemangku kepentingan untuk bertindak dalam memperjuangkan kepentingan mereka, baik melalui komunikasi formal maupun informal.
- d. **Kemungkinan Partisipasi:** Menilai seberapa besar kemungkinan pemangku kepentingan akan berpartisipasi atau bersikap terkait dengan kepentingan mereka, yang dapat mempengaruhi dinamika kebijakan.
- e. **Tingkat Pengaruh:** Mengukur pengaruh yang dapat diperoleh dari penguasaan sumber daya atau partisipasi pemangku kepentingan, yang akan berdampak pada keputusan yang diambil.
- f. **Implikasi:** Menganalisis implikasi dari pengaruh pemangku kepentingan terhadap strategi dan implementasi kebijakan yang dirumuskan.

- g. Implementasi Kebijakan: Mempertimbangkan bagaimana pengaruh dan partisipasi pemangku kepentingan dapat memengaruhi proses implementasi kebijakan.
- h. *Action*: Merumuskan tindakan yang perlu diambil untuk merespons atau mengantisipasi pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh yang mereka miliki, agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.

**Tabel 1. 5 Ethical Analysis Grid**

Kategori Stakeholders	Kepentingan	Sumber Daya	Channel	Kemungkinan Partisipasi	Tingkat Pengaruh	Implikasi	Action
Mereka yang (potensial) mendukung							
Mereka yang (potensial) menolak							

Sumber: Bryson (2004) dalam (Noor, Suaedi, & Mardiyanta, 2022)

Teknik ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan yang cepat mengenai siapa saja yang terlibat dan apa yang dinilai dari sudut pandang etika atau dianggap etis. Penggunaan teknik ini membantu dalam memenuhi aspek deontologis (berbasis kewajiban) dan teleologis (berorientasi pada hasil). Hasil dari penerapan teknik ini dapat mengidentifikasi proposal dan pilihan yang perlu dieliminasi berdasarkan pertimbangan etis yang telah ditetapkan.

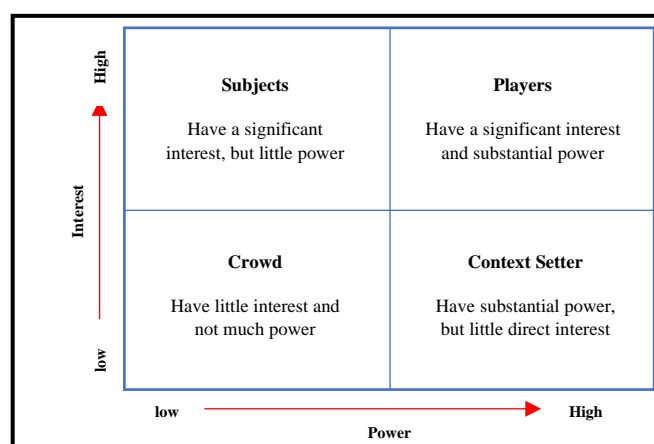
### 3. *Power vs Interest Grid*

Ackermann dan Eden, 2011 dalam Widyaningrum (2024) menjelaskan analisis pemangku kepentingan sebagai proses bertahap, yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan, menelaah relasi antar pihak dan potensi koalisi, lalu memetakan tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing. Klasifikasi berikutnya menggunakan matriks *power vs interest grid* untuk mengelompokkan

pemangku kepentingan ke dalam empat kategori, yaitu *player*, *context setter*, *subject*, dan *crowd* (Widyaningrum, 2024).

*Power* dimaknai sebagai kemampuan pemangku kepentingan memengaruhi atau menentukan kebijakan dan aturan dalam pengelolaan ekowisata, sedangkan *interest* merujuk pada tingkat dukungan yang diberikan karena terkait kebutuhan mencapai tujuan yang diharapkan. Pemahaman atas kedua aspek ini membantu menentukan cara mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan agar pengelolaan ekowisata berjalan lebih efektif.

Widyaningrum (2024) menjelaskan matriks *power versus interest grids* adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan posisi pemangku kepentingan dalam suatu organisasi berdasarkan tingkat kepentingan dan kekuatan mereka untuk mempengaruhi organisasi, baik saat ini maupun di masa depan. Dalam matriks ini, pemangku kepentingan dikategorikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu subjek (*subject*), pemain kunci (*players*), pengikut lain (*context setter*), dan pendukung (*crowd*).



**Gambar 1. 7 Matriks *Power vs Interest Grids***

Sumber: Widyaningrum (2024)

Berdasarkan matriks tersebut maka penempatan pemangku kepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Subjek (*Subject*): Pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah. Mereka perlu dilibatkan dan didengarkan, meskipun tidak memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan.
- 2) Pemain Kunci (*Players*): Kelompok ini memiliki baik kepentingan tinggi maupun pengaruh tinggi. Mereka adalah pemangku kepentingan yang sangat berpengaruh dan aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga keterlibatan mereka sangat penting untuk keberhasilan proyek.
- 3) Pengikut Lain (*Context Setters*): Pemangku kepentingan dalam kategori ini memiliki pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah. Mereka berfungsi untuk membentuk konteks dan kebijakan yang dapat mempengaruhi proyek, meskipun mereka tidak terlibat secara langsung dalam operasionalnya.
- 4) Pendukung (*Crowd*): Kelompok ini memiliki kepentingan rendah dan pengaruh rendah. Meskipun mereka mungkin tidak terlibat secara aktif, tetap penting untuk memperhatikan mereka dalam proses komunikasi dan informasi.

Penelitian ini menggunakan teori *Powers and Interest* yang dikembangkan oleh Ackerman & Eden (2011) dalam Widyaningrum (2024). Teori tersebut relevan dengan penelitian ini karena memberikan kerangka untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi pemangku kepentingan berdasarkan tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) mereka. Teori ini digunakan agar peneliti dapat memahami

peran dan dinamika berbagai *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo, Kabupaten Karanganyar.

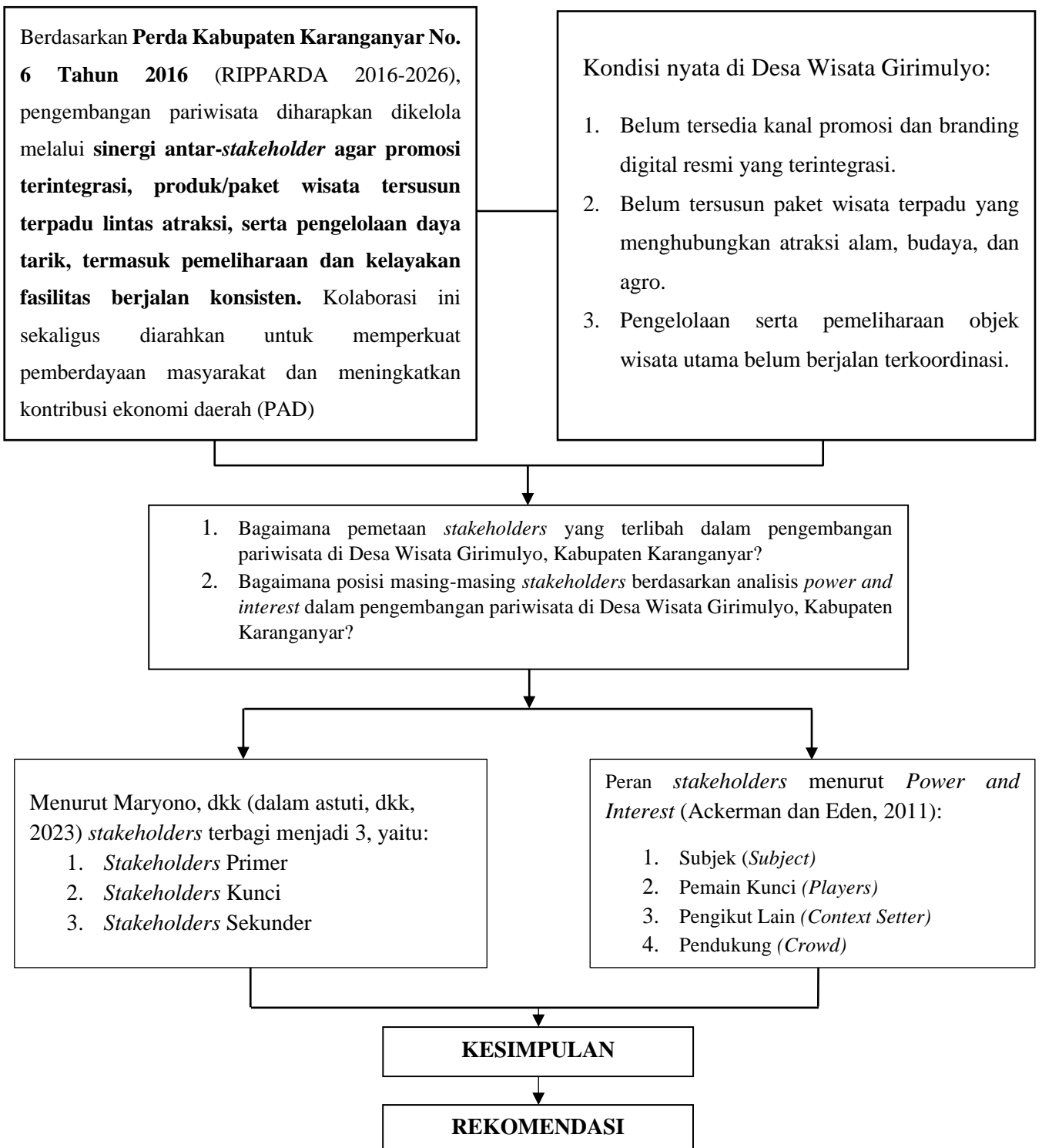
#### **1.6.2.8 Pengembangan Pariwisata**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1, tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pengembangan pariwisata adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengembangan destinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas kunjungan dan kesejahteraan masyarakat (Eddyono, 2021). Prayuda & Pratama (2024) mengemukakan pengertian pengembangan pariwisata merupakan pendekatan koordinatif lintas sektor dan wilayah yang bertujuan menciptakan efisiensi, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan destinasi pariwisata. Hasibuan dkk. (2023) mengartikan pengembangan pariwisata sebagai upaya peningkatan objek wisata agar lebih berkualitas dan menarik, baik dari sisi lokasi maupun fasilitasnya, sehingga mampu memikat kunjungan wisatawan. Soetomo (2001) dalam Astuti dkk. (2023), mengemukakan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu proses yang dinamis dan berorientasi pada masa depan untuk menghadapi tantangan dalam dunia pariwisata. Beberapa aspek penting dalam pengembangan pariwisata, yaitu:

- a. Atraksi, yaitu sesuatu yang dapat dilihat atau disaksikan melalui pertunjukan atau acara khusus yang diselenggarakan untuk para wisatawan.

- b. Aktivitas,, yaitu kegiatan yang berfokus pada kepentingan pergerakan kehidupan suatu kawasan, serta memberikan kegembiraan atau kesenangan.
- c. Aksesibilitas, yaitu fasilitas yang memudahkan wisatawan untuk mengunjungi lokasi dengan transportasi dan jalan yang mengarah ke tujuan wisata.
- d. Amenitas, yaitu dukungan fisik yang disediakan oleh pelaku industri pariwisata.

## 1.7 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

## 1.8 Fenomena Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian tersebut, penelitian ini akan menganalisis fenomena berikut:

1. *Stakeholders mapping* atau pemetaan pemangku kepentingan adalah metode untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta memetakan posisi, kewenangan, dan kepentingannya dalam suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini mengklasifikasikan *stakeholder* menjadi tiga kelompok, yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci dan, *stakeholder* sekunder dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo, Kabupaten Karanganyar.
2. Penelitian ini menggunakan matriks *power and interest grid* sebagai alat analisis untuk memetakan tingkat pengaruh dan kepentingan masing-masing *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo, Kabupaten Karanganyar.

**Tabel 1. 6 Fenomena Penelitian**

<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Fenomena</b>	<b>Sub Fenomena</b>
Identifikasi <i>Stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo	<i>Stakeholders Primer</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran langsung dalam perencanaan dan pengambilan keputusan</li> <li>2. Keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan pariwisata</li> <li>3. Kepemilikan usaha atau aset wisata</li> </ol>
	<i>Stakeholders Sekunder (pendukung)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan fasilitas, pendanaan, dan sumber daya</li> <li>2. Penyediaan pelatihan dan pendampingan</li> <li>3. Kolaborasi dalam promosi dan pemasaran wisata</li> </ol>
	<i>Stakeholders Kunci</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh besar dalam arah kebijakan pengembangan desa wisata</li> </ol>

Fokus Penelitian	Fenomena	Sub Fenomena
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mediasi atau penghubung antar <i>Stakeholders</i></li> <li>3. Kendala yang dihadapi <i>stakeholders</i> dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo</li> <li>4. Harapan <i>stakeholders</i> terhadap pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo</li> </ol>
Klasifikasi <i>stakeholders</i> berdasarkan <i>Power and Interest</i>	<i>Subject</i> (subjek)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepentingan tinggi terhadap isu</li> <li>2. Tingkat pengaruh rendah dalam pengambilan keputusan</li> <li>3. Keterlibatan aktif dalam aktivitas lapangan</li> </ol>
	<i>Players</i> (Pemain Kunci)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepentingan tinggi terhadap isu</li> <li>2. Tingkat pengaruh tinggi dalam pengambilan keputusan</li> <li>3. Penentu arah kebijakan dan strategi</li> </ol>
	<i>Context Setter</i> (Pengikut lain)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pengaruh tinggi terhadap isu</li> <li>2. Tingkat kepentingan rendah terhadap isu</li> <li>3. Tingkat pengaruh tinggi dalam penentuan regulasi</li> <li>4. Keterlibatan pasif dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ol>
	<i>Crowd</i> (Pendukung)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kepentingan rendah terhadap isu</li> <li>2. Tingkat pengaruh rendah terhadap isu</li> <li>3. Keterlibatan secara tidak langsung</li> </ol>

Sumber: Data diolah Peneliti (2025)

## **1.9 Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif untuk meraih pemahaman mendalam terhadap objek kajian. Pendekatan kualitatif memiliki filosofi postpositivisme atau interpretatif, serta digunakan guna mengeksplorasi fenomena dalam konteks alami. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi, dengan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Analisis data dilakukan secara induktif dengan penekanan pada penggalian makna, keistimewaan fenomena, pembentukan pemahaman mendalam, serta penyusunan hipotesis (Sugiyono, 2013).

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif (Sugiyono, 2013). Melalui pemahaman dan pendalaman yang menyeluruh terhadap objek yang diteliti, Kajian ini mampu menyediakan tanggapan serta penyelesaian atas masalah yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholders mapping*) dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo, Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini akan menerapkan pendekatan analisis yang tepat untuk menarik kesimpulan yang relevan.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Wisata Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang didasarkan pada judul penelitian yang diangkat yaitu *Stakeholders Mapping* dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Wisata Girimulyo, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini didasari oleh ketertarikan peneliti mengenai pemetaan *Stakeholders*. Desa Wisata Girimulyo

merupakan satu dari sekian banyak desa wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar yang dalam pengelolaannya dilakukan melalui kolaborasi beberapa *Stakeholders*. Ketertarikan ini juga berkaitan dengan adanya permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan yang menyebabkan menurunnya jumlah wisatawan serta masih kurangnya kegiatan promosi dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan teknik *snowball* dalam menentukan narasumber untuk memperoleh informasi secara mendalam. Teknik *snowball* yaitu teknik penentuan narasumber secara bergulir yang bermula sedikit kemudian berkembang menjadi lebih banyak sesuai dengan perkembangan pemenuhan informasi, seperti bola salju yang menggelinding secara terus-menerus (Sugiyono, 2013). Narasumber awal dalam penelitian ini yaitu Kasi Pemerintahan Desa Girimulyo, kemudian dilanjutkan kepada narasumber lain yang direkomendasikan sesuai dengan fokus penelitian ini.

### **1.9.4 Jenis Data**

Penelitian ini memanfaatkan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif disajikan dalam bentuk ungkapan verbal seperti teks, tulisan, frasa, atau simbol yang melukiskan orang, perilaku, serta kejadian dalam kehidupan sosial (Sugiyono, 2013). Contoh data kualitatif di penelitian ini meliputi deskripsi umum objek kajian, isu yang muncul, serta fungsi para *stakeholders*. Sementara data kuantitatif adalah jenis data yang bisa dihitung atau diukur langsung dalam wujud angka atau bilangan

(Sugiyono, 2013). Data kuantitatif dalam kajian ini mencakup tabel kuesioner *stakeholder* Desa Wisata Girimulyo.

### **1.9.5 Sumber Data**

Untuk memperoleh informasi terkait praktik pemetaan *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Girimulyo Kabupaten Karanganyar, peneliti memakai dua jenis sumber data, yaitu

#### **1. Data Primer**

Data primer diperoleh dari narasumber yang dikumpulkan langsung dari lapangan yaitu melalui wawancara dan observasi (Abdussamad, 2021). Untuk memperoleh data yang relevan, narasumber dipilih melalui teknik *snowball* dengan pertimbangan narasumber yang mengetahui dan terlibat dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Girimulyo.

#### **2. Data Sekunder**

Abdussamad (2021) menjelaskan data sekunder adalah data yang dikumpulkan sari sumber lain sebagai pendukung data primer, yang didapatkan dari peraturan perundangan, petunjuk teknis, dokumen, booklet, atau dokumen yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Girimulyo serta berkaitan dengan penelitian sehingga dapat melengkapi data primer.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan upaya sistematis untuk melengkapi informasi sesuai fokus penelitian (Abdussamad, 2021). Proses ini dilakukan melalui berbagai teknik saling melengkapi yang mempertajam analisis serta memastikan triangulasi data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

### 1) Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur. Wawancara ini memberikan keleluasaan responden untuk menjawab pertanyaan terbuka secara bebas. Selain itu proses tanya jawab mengalir menuju inti masalah sehingga tepat mencapai target yang diinginkan (Abdussamad, 2021).

### 2) Observasi

Teknik pengumpulan data berikutnya adalah observasi. Observasi melibatkan pencatatan fenomena lapangan lewat panca indera mengenai tindakan, ucapan, atau diskusi informan dalam rutinitas harian sebelum, saat, atau setelah kegiatan (Abdussamad, 2021). Dalam penelitian ini rencana observasi dilakukan di Desa Wisata Girimulyo untuk mengamati hasil kolaborasi yang telah dilaksanakan dalam pengembangan Desa Wisata Girimulyo secara umum dan secara khusus.

### 3) Dokumentasi

Di samping melakukan wawancara dan observasi, peneliti juga melihat, membaca, mengecek, dan memahami berbagai dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan (Abdussamad, 2021). Dokumen yang dimaksud seperti peraturan yang sudah ada, surat keputusan, surat perjanjian kerja sama, notulensi rapat saat melakukan kolaborasi, dan berbagai dokumen lain yang relevan.

### 1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data

Sugiyono (2013) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pengolahan dan pengaturan data secara terstruktur dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumen dengan menyusun data menjadi pola, memilih unsur penting untuk dipelajari, dan menyusun kesimpulan agar mudah dipahami sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif yakni pengolahan berdasarkan data lapangan yang kemudian dirumuskan menjadi hipotesis. Analisis data pada penelitian kualitatif berlangsung sejak pra lapangan, saat berada di lapangan, hingga pasca lapangan. Aktivitas analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) meliputi:

#### 1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara dan dokumentasi atau perpaduan ketiganya melalui triangulasi. Pada tahap permulaan peneliti mengeksplorasi objek kajian secara umum. Akibatnya peneliti memperoleh data yang banyak dan beragam.

#### 2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data mencakup penyusunan ringkasan pemilihan serta penekanan pada poin-poin utama sambil mencari tema dan pola. Saat mereduksi data peneliti berpijak pada teori serta sasaran penelitian. Data yang sudah direduksi pun memberikan ilustrasi lebih tajam sekaligus memudahkan pengumpulan data lanjutan dan pencarian ulang jika dibutuhkan.

#### 3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan setelah tahap reduksi data selesai. Dalam penelitian kualitatif data bisa disajikan melalui narasi ringkas bagan relasi kategori matriks alur atau bentuk serupa. Penyajian data kualitatif umumnya berwujud teks naratif. Penyajian data bertujuan mempermudah pemahaman fenomena serta perencanaan langkah berikutnya berdasarkan insight yang diperoleh.

#### 4. *Concluding Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Miles dan Huberman (1984) menyebutkan bahwa tahap keempat analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Kesimpulan awal bersifat sementara dan rentan berubah kecuali didukung bukti kuat pada pengumpulan data berikutnya. Jika kesimpulan tersebut diperkuat oleh temuan valid konsisten saat kembali ke lapangan maka hasilnya kredibel. Kesimpulan penelitian kualitatif bisa menjawab rumusan masalah awal meski ada kemungkinan tidak sepenuhnya karena masalah dan rumusannya bersifat fleksibel dan dapat berkembang atau bergeser selama proses lapangan.

Pengumpulan data yang terstruktur dapat membantu penulis dalam menyusun laporan penelitian dengan lebih teratur. Dengan demikian, penulis dapat menerapkan metode pengumpulan data yang dimulai dengan merangkum poin-poin utama, menarasikannya, dan menarik kesimpulan.

### **1.9.8 Kualitas Data**

Keberhasilan dalam mencapai tujuan eksplorasi masalah serta tingkat kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian disebut kredibilitas dalam penelitian kualitatif. Pengujian kredibilitas pada penelitian kualitatif, salah satunya

dapat dilakukan melalui triangulasi data. Triangulasi untuk menguji kredibilitas berarti memverifikasi data dari berbagai sumber melalui beragam metode dan waktu. Tiga jenis teknik triangulasi umum dalam penelitian menurut Abdussamad (2021) meliputi:

1. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber berbeda dengan teknik pengumpulan yang sama.
2. Triangulasi teknik yaitu penerapan berbagai teknik pengumpulan data berbeda pada sumber yang sama seperti observasi partisipatif wawancara mendalam dan dokumentasi secara bersamaan.
3. Triangulasi waktu yaitu pemeriksaan kredibilitas data melalui wawancara observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi berbeda dengan pengulangan hingga data konsisten dan pasti.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini menggunakan dua teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Peneliti melakukan ini dengan mengajukan pertanyaan yang sama kepada 5 narasumber dan menganalisis jawaban mereka untuk mengonfirmasi apakah jawaban tersebut konsisten atau berbeda. Sementara itu, triangulasi teknik melibatkan pengumpulan data dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian membandingkan data hasil wawancara dengan isi dokumen yang relevan.